



Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal

(Socialization of Combating Illegal Cigarettes in Tonggara Village, Kedungbanteng District, Tegal Regency)

Moh.Taufik ^{1*}, Sanusi Sanusi ², Moh.Khamim ³, Fajar Ari Sudewo ⁴, Mukhidin
Mukhidin ⁵

¹⁻⁵ Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email: moh_taufik@upstegal.ac.id *

Article History:

Received: November 30, 2024;

Revised: Desember 14, 2024;

Accepted: Desember 28, 2024;

Online Available : Januari 07,
2025;

Keywords: Excise , Socialization of
illegal cigarettes, active community
participation.

Abstract: Excise has a role to ensure that the circulation of certain excisable goods has met the distribution standards set by the government. Legal circulation of excisable goods is important so that people in consuming goods, such as tobacco products (cigarettes) have met the distribution standards, in addition to providing education to the community to participate in efforts to increase government revenue in terms of excise rates. Efforts to prevent illegal cigarettes will be effective if they involve various parties, both from law enforcement, universities and the community to help the state maximize state revenue. The goal to be achieved in this activity is to provide an understanding to students about the importance of understanding the importance of working together to prevent the circulation of illegal cigarettes in the community because in addition to having legal impacts on perpetrators and dealers, illegal cigarettes can also reduce state revenue.

Abstrak

Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai. Upaya pencegahan rokok ilegal akan efektif jika melibatkan berbagai pihak baik dari aparat hukum, perguruan tinggi dan masyarakat untuk membantu negara dalam memaksimalkan pemasukan negara. Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah guna memberikan pemahaman kepada warga masyarakat siswa tentang pentingnya pemahaman akan pentingnya bersama sama untuk mencegah peredaran rokok ilegal di masyarakat karena selain memberi dampak hukum bagi pelaku dan pengedar, rokok ilegal juga dapat mengurangi pemasukan Negara.

Kata Kunci : Cukai , Sosialisasi gempur rokok ilegal, paritipasi aktif masyarakat

1. PENDAHULUAN

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting

agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Upaya pengawasan terhadap pengendalian peredaran rokok ilegal, yang disertai penegakan hukumnya penting untuk dilakukan. Upaya Peningkatan Pengawasan Penegakkan Hukum atas Peredaran Rokok Ilegal, meliputi:

1. Peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai).
2. Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronis.
3. Pengawasan produksi BKC secara elektronik.
4. Pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran.
5. Pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak.

Kerjasama yang baik antara instansi, baik direktorat jenderal bea dan cukai maupun dinas perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran rokok ilegal, akan berdampak positif dalam rangka pengendalian dan penegakan hukumnya. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengkonsumsian terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.

Permasalahan Mitra

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan kegiatan ini adalah:

1. Memberi pemahaman masyarakat bahwa peredaran rokok ilegal membawa dampak hokum serta merugikan keuangan Negara.

2. Memberi memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan pamong desa tentang pentingnya kerjasama untuk bekerjasama membantu program pemerintah dalam rangka dapat meningkatkan pendapatan Negara.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini berlandaskan post positivisme yang digunakan untuk mengamati kondisi objek yang alamiah, menjelaskan keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta yang tampak (Prakoso, 2020). Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu Pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya (Moleong, 2018). Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain :

- a. Waktu dan Tempat : waktu pelaksanaan pengabdian ini tanggal 26 November 2024.
- b. Observasi lapangan : observasi lapangan dilakukan dengan melakukan survey langsung maupun diskusi dengan mitra untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
- c. Wawancara semi terstruktur dengan warga masyarakat dan perangkat desa mengenai gempur rokok legal.

Teknik Pelaksanaan Tim pelaksana abdimas ini terdiri dari lima orang dosen dan dua orang mahasiswa, tim sebagai pemateri dengan mitra sebagai peserta. Kegiatan abdimas Pelaksanaan berlangsung selama satu hari yang di bagi menjadi dua sesi, yaitu :

a. Sesi 1 (penyampaian materi)

Sesi pertama dilakukan pada pagi hari yaitu dengan menyampaikan materi kepada warga masyarakat dan perangkat desa Tonggara Kecamatan Kabuapten Tegal mengenai gempur rokok ilegal dan dampak hukum bagi pelaku.

b. Sesi 2 (diskusi dan tanya jawab)

Setelah memberikan pengetahuan dan informasi mengenai perundungan, kemudian dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab kepada warga masyarakat desa Tonggara Kecamatan kedungbanteng Kabupaten Tegal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan abdimas ini terdiri dari lima orang dosen dan dua orang mahasiswa, tim sebagai pemateri dengan warga desa tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten

tegal sebagai peserta. Kegiatan abdimas Pelaksanaan berlangsung selama satu hari yaitu tanggal 26 November 2024 di bagi menjadi dua sesi, yaitu :

a. Sesi 1 (penyampaian materi)

Sesi pertama dilakukan pada pagi hari yaitu dengan menyampaikan materi kepada warga desa dan perangkat desa Tonggara Kec. Kedungbanteng..

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Upaya pengawasan terhadap pengendalian peredaran rokok ilegal, yang disertai penegakan hukumnya penting untuk dilakukan. Upaya Peningkatan Pengawasan Penegakkan Hukum atas Peredaran Rokok Ilegal, meliputi:

6. Peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai).
7. Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronis.
8. Pengawasan produksi BKC secara elektronik.
9. Pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran.
10. Pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak.

Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengkonsumsian terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut

b. Sesi 2 (diskusi dan tanya jawab)

Warga masyarakat dan perangkat desa Tonggara antusias mendengarkan diskusi sampai selesai, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan baru akan peredaran rokok ilegal yang sudah meresahkan dan merugikan uang Negara..



Gambar 1: Penyampaian Materi



Gambar 2: Diskusi dan Tanya Jawab

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian di desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal mengenai gempur rokok ilegal memberi manfaat kepada masyarakat dan penrangkat desa mengenai manfaat dari adanya upaya pemerintah yang secara gencar mengkampanyekan gerakan pembrantasan rokok ilegal yang semakin massif. Angka yang ditimbulkan dari kegiatan ilegal rokok sangat merugikan Negara, pemasukan Negara hilang sangat besar, dan masyarakat juga mendapat imbas dampak kesehatan konsumsi rokok yang tidak menggunakan standar nasional.

Saran

Saran yang direkomendasikan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan ini yaitu perlunya pendampingan lebih lanjut dari pemerintah khususnya pemerintah daerah dan desa dalam mengawal program pemerintah sehingga kampanye ini akan sukses untuk di implementasikan sehingga tujuan pemerintah dan Negara dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia Bandung.
- Arifin, A. (2020). *Paradigma baru public relations: Teori, strategi dan riset*. Rajawali Pers.
- Butterick, K. (2013). *Pengantar public relations: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan dan strategi komunikasi* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2011). *Effective public relations* (Edisi kesembilan). Kencana.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi kedua). Gadjah Mada University Press.
- Effendy, O. U. (2002). *Hubungan masyarakat: Suatu studi komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2007). *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2019). *A first look at communication theory* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hartley, P. (1999). *Interpersonal communication* (2nd ed.). Routledge.
- Jones, P. (2008). *Communicating strategy*. Gower Publishing Company.
- Straubhaar, J., Larose, R., & Davenport, L. (2012). *Media now: Understanding media, culture, and technology* (7th ed.). Wadsworth.
- Suwatno. (2018). *Pengantar public relations kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- West, R., & Turner, L. H. (2010). *Introducing communication theory: Analysis and application* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses dan studi kasus* (Edisi revisi). Caps.

Journals

Barber, S., & Ahsan, A. (2009). The tobacco excise system in Indonesia: Hindering effective tobacco control for health. *Journal of Public Health Policy*, 30(2), 208–225. <https://doi.org/10.1057/jphp.2009.12>

Ghrivu, A. I. (2013). The Aida model for advergaming. *USV Annals of Economics and Public Administration*, 13(1(17)), 90–98.

Hassan, S., Nadzim, S. Z. A., & Shiratuddin, N. (2015). Strategic use of social media for small business based on the AIDA model. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 172, 262–269. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.363>

Joossens, L., & Raw, M. (2012). From cigarette smuggling to illicit tobacco trade. *Tobacco Control*, 21(2).

Regulations

Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 903.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105.